

**EVALUASI PELAKSANAAN PENYALURAN BLT SUBSIDI KENAIKAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) DI KELURAHAN TLOGOMAS TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Disusun Oleh :

DOMINIKA

NIM. 2019210062

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

EVALUASI PELAKSANAAN PENYALURAN BLT SUBSIDI KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KELURAHAN TLOGOMAS TAHUN 2022

Dominika

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
Email: dominikaputriani13@gmail.com

Ringkasan

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada September 2022. Program BLT Bersubsidi Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi dampak bencana alam. Naiknya biaya bahan bakar. Upaya terakhir untuk mendaftarkan warga kurang mampu di Kelurahan Tlogomas belum berhasil. Dengan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan penyaluran BLT-BBM dan mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya di Desa Tlogomas pada tahun 2022. Teknik deskriptif digunakan dalam metodologi kualitatif penelitian ini. menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Penyaluran BLT-BBM di Kecamatan Tlogomas telah berhasil dan efisien, demikian temuan studi tersebut. Pelaksanaan penyaluran BLT-BBM diuntungkan oleh struktur birokrasi yang efektif, dukungan sumber daya, dan komunikasi yang kuat. Masyarakat yang tidak membawa identitas diri ke tempat pengumpulan atau undangan yang datang terlambat menjadi kendala pelaksanaan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Penyaluran BLT-BBM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah fenomena yang dapat diidentifikasi oleh orang-orang yang bersentuhan dengan kesadaran diri dan integritasnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu materi dan non materi. Kemiskinan material terdiri dari kemiskinan pendapatan, sedangkan kemiskinan non material meliputi kemiskinan pekerjaan, akses pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum. Ketika kemiskinan tidak berhasil, itu terkait dengan karakter yang kuat seperti emo, psikologi, dan spiritualitas. Semua kondisi saat ini mempersulit orang dengan sistem kekebalan yang lemah untuk keluar dari situasi genting jika tidak ada peringatan keras yang diberikan oleh otoritas yang letih (Gopal et al., 2021). Kemiskinan adalah konsep multifaset yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik kehidupan. Ini juga dikenal sebagai kehidupan biasa atau kondisi di mana seseorang memiliki banyak uang atau hati. Kemarahan kemusyrikan bisa ditujukan kepada negara atau rumah (Pabuccu, 2017:510).

Penduduk miskin Kota Malang akan menjadi 38,56 ribu (4,37 persen) pada tahun 2022. Batas kemiskinan di Kota Malang meningkat sekitar 39,3 ribu rupiah dari ambang kemiskinan tahun 2021 menjadi Rp 609.612,00 per kapita per bulan. Orang miskin adalah mereka yang pengeluaran bulanan per kapitanya di bawah tingkat kemiskinan federal. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 1,00, naik 0,13 poin dari tahun 2021 sebesar 0,87, mencerminkan hal tersebut. Sementara itu, sedikit peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Malang menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran di kalangan penduduk miskin semakin besar. Nilai P2 Kota Malang adalah 0,34 pada tahun 2022, meningkat 0,12 poin dari nilai 0,22 pada tahun 2021 (BPS Kota Malang, 2022).

Gambar 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang
Pada Tahun 2020-2022

Wilayah Jawa Timur	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur								
	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (P0)			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TIMUR	4 419,10	4 572,73	4 181,29	11,09	11,40	10,38	416 001,00	429 133,00	460 909,00
Kota Surabaya	145,67	152,49	138,21	5,02	5,23	4,72	592 137,00	611 466,00	652 540,00
Kota Probolinggo	17,72	17,91	16,16	7,43	7,44	6,65	524 528,00	545 955,00	575 195,00
Kota Pasuruan	13,40	13,96	13,02	6,66	6,88	6,37	441 531,00	461 624,00	486 893,00
Kota Mojokerto	8,09	8,37	7,88	6,24	6,39	5,98	482 016,00	493 452,00	531 804,00
Kota Malang	38,77	40,62	38,56	4,44	4,62	4,37	554 791,00	570 238,00	609 612,00
Kota Madiun	8,83	9,06	8,49	4,98	5,09	4,76	497 628,00	514 409,00	551 620,00
Kota Kediri	22,19	22,55	21,15	7,69	7,75	7,23	493 438,00	506 936,00	537 326,00

Sumber : BPS Kota Malang

Gambar 1.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di
Kota Malang Pada Tahun 2020-2022

Wilayah Jawa Timur	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kab/Kota di Jawa Timur					
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TIMUR	1,82	1,84	1,62	0,43	0,43	0,38
Kota Surabaya	0,87	0,75	0,69	0,24	0,17	0,18
Kota Probolinggo	1,19	0,90	1,04	0,28	0,17	0,23
Kota Pasuruan	0,78	1,15	0,93	0,14	0,27	0,22
Kota Mojokerto	0,64	0,84	0,87	0,10	0,17	0,18
Kota Malang	0,66	0,87	1,00	0,15	0,22	0,34
Kota Madiun	0,77	0,67	0,40	0,18	0,15	0,06
Kota Kediri	0,96	1,03	1,42	0,17	0,21	0,41
Kota Blitar	0,98	1,05	0,90	0,22	0,28	0,19

Sumber : BPS Kota Malang

Di bulan pertama tahun 2020 yaitu bulan Maret, fenomena pandemi yang dikenal dengan nama Covid-19 melanda Indonesia. Hingga Desember 2020, akan ada lebih dari 700.000 kasus Covid-19 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ekonomi keterpurukan memiliki kejadian penyebaran dan peningkatan kasus yang sangat cepat dan konsisten. Berbeda dengan faktor lain, Pandemi Covid-19 memasukkan tanda peringatan yang tidak biasa yang meningkatkan tingkat kemiskinan dan responsivitas di Indonesia (Bahasoan et al., 2021:40).

Khususnya di negara-negara berkembang atau miskin, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dianggap sebagai masalah serius. Sekarang diperdebatkan apakah penting atau tidak untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, mengukur kemiskinan secara akurat, atau mengatasi kesenjangan pendapatan. Penyebab kemiskinan harus ditangani dari semua sudut, dan sangat penting untuk mengidentifikasi titik lemah dan mengambil tindakan yang tepat (Pabuccu, 2017:517).

Program BLT (BLT) merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin mengurangi beban keuangan dan melindungi daya beli mereka dari dampak kenaikan harga BBM. Untuk mengurangi dampak pencabutan subsidi bensin (BBM) pada rumah tangga berpenghasilan rendah, program ini awalnya diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai bantuan tunai sebesar 1,2 juta setiap tahun (Bank Dunia, 2017). Dengan potensi pemirsa 15–19 juta rumah, program ini berfokus pada 30% rumah tangga Indonesia dengan pendapatan terendah. Akibatnya, menurut Izzati et al. (2020:47), program BLT merupakan salah satu program bantuan sosial terbesar di dunia.

Pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pertalite menjadi Rp10.000 per liter pada 3 September 2022, dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Selain pertalite, harga solar naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, sedangkan harga BBM Pertamina nonsubsidi mengalami perubahan harga dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Daya beli masyarakat akan terpengaruh oleh perubahan harga bensin. Akibat dampak dari kenaikan harga

bensin, maka pemerintah membuka kembali program BLT (BLT)-BBM pada September 2022 untuk masyarakat umum (Antaraneews, 2022).

20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran kebijakan BLT BBM, dan telah dicairkan sebesar Rp6,2 triliun atau 50% dari keseluruhan anggaran sebesar Rp12,39 triliun (KEMENKEU, 2022). Masyarakat menerima BLT (BLT) BBM selama dua bulan dengan tarif Rp 150.000 setiap bulan, dengan total Rp 300.000. BBM BLT diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. (KEMENSOS, 2022). Penerima BLT BBM harus masyarakat berpenghasilan rendah yang bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri, dan terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Urusan di bawah Rp 3,5 juta per bulan (CNBC Indonesia, 2022).

Dalam pelaksanaan program BLT Bahan Bakar Minyak ini, anggaran yang ditetapkan sebagai BLT menjadi tidak konsisten/tidak mencukupi dalam hal pendistribusiannya ke seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat yang ekonomi/pendapatannya menurun akibat dampak Covid-19. 19 dan kenaikan harga komoditas. Oleh karena itu, pemerintah harus memilih orang-orang yang benar-benar layak mendapatkan bantuan sosial berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya.

231 KPM diterima di Desa Tlogomas selama bulan September dan Oktober 2022. Pada tanggal 9 September 2022, pembayaran BLT-BBM telah selesai; 219 KPM menerima bantuan, sedangkan 12 KPM menolaknya. Hal ini disebabkan karena keluarga penerima sakit, 7 KPM pergi tanpa cuti, dan 4 KPM dalam kategori mampu.

Dikarenakan warga di Desa Tlogomas yang namanya belum diusulkan oleh Rukun Tetangga (RT) setempat, padahal warga tersebut memang layak mendapatkan bantuan, pendataan warga miskin baru akibat dampak Covid-19 belum berhasil. , menyebabkan pemilihan penerima manfaat yang tidak akurat. manfaat bantuan sosial. Jika manfaat bansos

tidak terdistribusi secara adil, maka dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan konflik dan menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin. Untuk secara efektif mencocokkan individu yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari BLT bersubsidi dengan kenaikan bahan bakar minyak, distribusi BLT (BLT) BBM membutuhkan data yang valid.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana penyaluran bantuan pembayaran BBM secara langsung serta variabel pendorong dan penghambat apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya di dusun Tlogomas. untuk membangkitkan rasa ingin tahu para sarjana untuk mengeksplorasi topik tersebut **“Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran BLT Subsidi Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Tlogomas Tahun 2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah terdeskripsikan, sehingga permasalahan yang nantinya pemabahasannya ialah:

1. Bagaimana mengevaluasi melaksanakan menyalurkan BLT subsidi kenaikan BBM di kelurahan Tlogomas tahun 2022 ?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pada pelaksanaan menyalurkan BLT subsidi kenaikan BBM di kelurahan Tlogomas tahun 2022 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tentunya ada tujuan yang ingin tercapai pada riset berikut:

1. Untuk mengevaluasi melaksanakan menyalurkan BLT subsidi kenaikan BBM di kelurahan Tlogomas tahun 2022
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pada pelaksanaan menyalurkan BLT subsidi kenaikan BBM di kelurahan Tlogomas tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, Harapannya bisa dijadikan acuan oleh peneliti yang akan melaksanakan riset yang sama.
2. Secara Non Akademis, Harapannya bisa menjadikan sebuah tambahan wawasan untuk publik dan menjadikan kritik dan saran yang membangun untuk pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ambiyar, Muharika. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant N. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, Lexy.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Bayu Media: UMM Press.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin.A. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Wahab, Solichin.A. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Jurnal:

- Ghunu, Agustinus, dkk (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa*. Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik Unmer, Vol 6 (1)2021. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 dari:<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/4913/pdf>
- Gopal, Parthiban.S, Dkk. (2021). *Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal*. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.6 No.1, 40-51.
- Juliandri. (2022). *Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau*. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.9 No.1.
- Marta, Fitri Yul Dewi, Ramadiyanti Nurlitasari. (2021). *Implementasi Penyaluran BLT Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020*. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol.1 No.1, 47-59.
- Masambe, dkk. (2021). *Evaluasi Program BLT Di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara*, Vol.7 No.107.

- Pabuccu, Hakan. (2017). *Measuring Poverty Level of Households by Using Fuzzy Logic. Advances in Economics and Business*, Vol.5 No.9, 510-517.
- Setyawan, Yanto. (2019). *Evaluasi Program Inovasi Pelayanan Malam*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8 No.3, 19-20.
- Sofi, Irfan. (2021). *Efektivitas BLT Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol.6 No.3, 247-262.
- Sumarsyah, Wilda. (2021). *Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2019-2020 Di Kecamatan Lubuk Basung*. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, Vol.3 No.1.

Skripsi/Tesis:

- Dewi, Mega Sutra. 2011. *Evaluasi Program BLT Di Kecamatan Kramatwatu*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.
- Ortega, Daniel. 2021. *Pelaksanaan BLT Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Syahrudin. 2009. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Di Kabupaten Karawang*. Universitas Indonesia.
- Tsania, Nur Fitra. 2022. *Implementasi Program BLT Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Internet:

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2021). *Profil Kemiskinan Kota Malang 2021*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 dari: <https://malangkota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 dari: <https://bps.go.id>
- Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan BLT Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022 dari: <https://sikompak.bappenas.go.id>
- CNN Indonesia. (2022). *Siapa Saja Penerima BLT BBM*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022 dari: <https://www.cnnindonesia.com>
- KEMENKEU. (2022). *Dirjen Anggaran Sampaikan Update Penyaluran BLT BBM*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022 dari: <https://kemenkeu.go.id>
- KEMENSOS. (2022). *BLT (BLT) BBM*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022 dari: <https://kemensos.go.id>

Sumber lain:

- Daftar Hadir Penyaluran BLT (BLT) BBM Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2022
- Laporan Bulanan Petugas PUSKESOS Kelurahan Tlogomas Periode September 2022

Laporan Pencairan BLT-BBM Melalui PT POS Indonesia Kelurahan Tlogomas Kecamatan
Lowokwaru tahun 2022

